



Strategi Direktorat Pnfi Dalam Penyaluran Bantuan Sarana Dan Peralatan Pada Sekolah Nonformal

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Neylan Rabbany Universitas Muhammadiyah Jakarta haikalhaka23@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Nida Handayani Universitas Muhammadiyah Jakarta	
Widiatmojo Suseno Universitas Muhammadiyah Jakarta	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Rabbany, N., Handayani, N., & Suseno, W. (2026). Strategi Direktorat Pnfi Dalam Penyaluran Bantuan Sarana Dan Peralatan Pada Sekolah Nonformal. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2185-2190.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dalam penyaluran bantuan sarana dan peralatan pada lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Fokus utama kajian adalah proses perencanaan program bantuan yang meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan strategis, serta Bentuk Strategi Program Bantuan Sarana dan Peralatan dalam keberlangsungan program. Program revitalisasi sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nonformal yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada hasil guna mendukung visi Asta Cita ke-4 dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan aksesibilitas teknologi. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan bantuan sarana fisik dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemantauan berkelanjutan dianggap krusial agar sarana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berdampak positif bagi layanan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan yang tepat menjadi dasar utama dalam perencanaan yang efektif, sedangkan pengelolaan berbasis hasil membantu mencapai tujuan strategis program.

Kata kunci: Pendidikan Nonformal, Bantuan Sarana, Perencanaan Strategi, Revitalisasi, Pengelolaan Pendidikan.

Abstract

This study examines the strategies implemented by the Directorate of Nonformal and Informal Education (PNFI) in the distribution of facilities and equipment to nonformal educational institutions such as Community Learning Centers (PKBM) and Learning Activity Centers (SKB). The main focus of the study is the planning process for the assistance program, which includes needs analysis, the formulation of strategic objectives, and the strategic framework for the Facilities and Equipment Assistance Program to ensure the program's sustainability. This infrastructure revitalization program is part of the government's efforts to support human resource development by improving the quality of non-formal education—making it high-quality, equitable, and results-oriented—to support the fourth pillar of the *Asta Cita* vision regarding the improvement of human resource quality and technological accessibility. A holistic approach that integrates physical facility assistance with institutional capacity building and continuous monitoring is considered crucial to ensure that the distributed facilities are utilized optimally and have a positive impact on educational services. The study's findings indicate that an accurate needs analysis serves as the primary foundation for effective planning, while results-based management helps achieve the program's strategic objectives.

Keywords: Nonformal Education, Infrastructure Support, Strategic Planning, Revitalization, Education Management

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan nonformal dan informal memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya memastikan efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga tersebut, diperlukan adanya pembinaan tata kelola yang baik. Tata kelola yang efektif dapat membantu lembaga pendidikan nonformal dan informal dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, program pembinaan tata kelola dirancang sebagai bentuk pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal dan informal. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, pemerintah menetapkan program prioritas nasional *Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang Berkualitas* sebagai upaya mendukung *Asta Cita* ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, serta pembangunan karakter generasi muda yang inovatif dan adaptif. Program revitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta menyediakan sarana dan peralatan esensial guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman (PNFI, 2026).

Pendidikan nonformal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berperan dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Keberadaan satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui program penyaluran bantuan sarana pendidikan. Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Melalui berbagai layanan seperti pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, kursus, dan pelatihan keterampilan, satuan pendidikan nonformal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pemerataan Pendidikan (Ilmu & Nonformal, 2022). Perencanaan strategi dalam suatu program menjadi aspek penting untuk memastikan setiap kegiatan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Suatu program tidak hanya membutuhkan ketersediaan sumber daya, tetapi juga memerlukan proses perencanaan yang sistematis melalui identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan langkah pelaksanaan, serta pengelolaan sumber daya yang tepat. Perencanaan yang baik dapat membantu organisasi menyesuaikan program dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat yang optimal (Juknis, n.d.).

B. Metodologi

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai rancangan strategi program bantuan sarana dan peralatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan program bantuan yang meliputi penetapan tujuan program, rancangan program, dan persiapan yang dilakukan oleh tim revitalisasi sebelum pelaksanaan program penyaluran bantuan sarana di sekolah non-formal. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai strategi perencanaan yang digunakan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal (Organisasi, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebutuhan sebagai Dasar Perencanaan Strategi Program

Analisis kebutuhan sebagai dasar perencanaan strategi program mengidentifikasi kondisi suatu program pendidikan nonformal. Identifikasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan organisasi saat ini, khususnya terkait ketersediaan sumber daya pendidikan, kemampuan dalam mendukung kegiatan pendidikan, serta upaya revitalisasi yang diperlukan. Lembaga pendidikan nonformal menjadi fokus utama pada fase ini karena setiap lembaga memiliki kondisi yang berbeda-beda, seperti tingkat fasilitas, jenis layanan pendidikan yang disediakan, jumlah siswa, atau kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sarana secara individual. Temuan identifikasi yang disebutkan di atas kemudian digunakan sebagai landasan bagi inisiatif revitalisasi guna menentukan kebutuhan paling penting yang harus dipenuhi oleh inisiatif bantuan. Proses penetapan prioritas melibatkan penilaian tingkat kebutuhan dan kegunaan sarana yang telah disebutkan sebelumnya dalam kaitannya dengan efektivitas layanan pendidikan. Akibatnya, sarana yang diimplementasikan tidak hanya memenuhi permintaan lembaga, tetapi juga membuatnya lebih relevan dengan tujuan program revitalisasi. Prosedur ini menunjukkan bagaimana pendekatan strategis, atau menghubungkan kebutuhan di lapangan dengan tujuan kebijakan yang dimaksudkan, diterapkan dalam pelaksanaan program (PNFI, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, tim revitalisasi melakukan pengumpulan dan analisis informasi sebelum meluncurkan program bantuan. Informasi ini digunakan untuk memahami perbedaan antara kondisi sarana yang tersedia dan kebutuhan ideal yang diperlukan oleh pendidikan nonformal. Kesenjangan yang dimaksud menjadi landasan dalam merancang jenis program intervensi agar bantuan yang diberikan dapat mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis kebutuhan tidak hanya menelaah aspek fisik, yaitu ketersediaan sarana, tetapi juga menyoroti peran sarana dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Sarana pendidikan dianggap sebagai komponen pendukung yang memiliki hubungan erat dengan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu ditentukan apakah sarana yang disediakan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan efektivitas layanan, dan memberikan manfaat secara tepat waktu kepada penerima (Muta, 2025).

Proses verifikasi kesiapan lembaga calon penerima bantuan juga terkait dengan analisis kebutuhan. Kesiapan semacam ini merupakan salah satu langkah terpenting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Lembaga penerima tidak hanya dipandang sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai komponen dari strategi keberhasilan program, karena kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sarana merupakan faktor penentu efektivitas bantuan tersebut.

Dari sudut pandang strategi organisasi, proses analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam memahami lingkungan sebelum perusahaan memilih rencana yang akan dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kondisi organisasi, Wheelen dan Hunger berpendapat bahwa perusahaan harus menganalisis lingkungan internal dan eksternalnya sebelum merumuskan strategi (Eko, 2013). Analisis kebutuhan berfungsi sebagai salah satu bentuk lingkungan eksternal organisasi dalam kerangka program bantuan sarana pendidikan nonformal, yaitu memahami kebutuhan suatu lembaga pendidikan yang menjadi sasaran program.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan memainkan peran penting dalam mengurangi risiko program. Tanpa proses yang jelas untuk mengidentifikasi kebutuhan, sarana bantuan mungkin tidak selaras dengan kebutuhan organisasi atau mungkin bukan cara terbaik untuk mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, proses analisis kebutuhan menjadi fokus utama strategi program karena menentukan jenis dukungan yang diperlukan, arah bantuan, dan sasaran yang harus dicapai melalui program revitalisasi. Selain itu, pendekatan berbasis

kebutuhan juga sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang menggunakan data dan kondisi lapangan sebagai landasan pengambilan keputusan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara sistematis agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan (Wulandari et al., 2023). Oleh karena itu, analisis kebutuhan dalam program pendidikan nonformal bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga proses strategis yang menentukan kualitas program secara keseluruhan.

Pembahasan

Perumusan Tujuan Strategis Program Bantuan Sarana dan Peralatan

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan di lapangan, langkah praktis berikutnya yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah menetapkan tujuan strategis program. Tujuan ini bukan sekadar orientasi administratif; melainkan upaya untuk menjalin keterkaitan antara kondisi aktual organisasi pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dengan kebijakan pemerintah pusat. Secara khusus, tujuan dari perumusan ini adalah untuk mendukung visi pembangunan nasional yang diusung dalam Asta Cita ke-4. Visi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas tinggi dan tepat waktu serta pemanfaatan kemajuan teknologi (PNFI, 2026). Proses ini memastikan bahwa setiap jenis sarana dan peralatan yang digunakan memiliki tujuan pencapaian yang jelas dan spesifik, bukan sekadar distribusi barang tanpa arah yang jelas (Andriana, 2025).

Pemerataan aksesibilitas dan peningkatan mutu layanan pembelajaran merupakan dua isu utama di sektor pendidikan nonformal yang harus ditangani melalui program strategis bantuan sarana dan peralatan. Dari sudut pandang yang lebih sederhana, program ini bertujuan untuk memungkinkan organisasi nonformal yang sebelumnya menghadapi kendala infrastruktur untuk memiliki lingkungan belajar yang modern dan berkesan. Dengan demikian, proses belajar mengajar standar di ruang kelas nonformal dapat disejajarkan dengan pendidikan formal guna mencapai pembelajaran yang kompetitif. Tim revitalisasi di tingkat kementerian menetapkan bahwa intervensi bantuan harus secara langsung berkontribusi pada peningkatan efektivitas tata kelola lembaga penerima serta pengembangan keterampilan belajar di kalangan Masyarakat (Irmianti et al., 2026). Pandangan ini didasarkan pada prinsip rasional bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berbanding lurus dengan peningkatan motivasi belajar dan pencapaian akademik peserta didik secara keseluruhan.

Penerapan rencana pengelolaan yang berorientasi pada hasil merupakan, pada kenyataannya, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis ini (pengelolaan berbasis hasil). Tingkat keawetan atau keberlanjutan penggunaan peralatan, beberapa hasil terbaik yang dicapai oleh mahasiswa, dan beberapa implikasi penting bagi nilai akreditasi lembaga hanyalah beberapa dari indikator keberhasilan komprehensif yang telah dikembangkan oleh Direktur PNFI dan tim revitalisasi sejak dimulainya program ini. Sarana dan peralatan tiba di lokasi sasaran, pengelola lembaga penerima harus memiliki kemampuan manajemen dan literasi teknis yang diperlukan untuk memanfaatkan sarana dan peralatan tersebut guna memenuhi kebutuhan pendidikan jangka panjang. Pada akhirnya, pemerintah menggunakan tujuan strategis ini sebagai landasan akuntabilitas. Analisis kesenjangan (gap analysis) yang ditemukan selama fase identifikasi berfungsi sebagai landasan bagi setiap pengadaan sarana dan peralatan. Direktorat PNFI meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau inefisiensi dengan berfokus pada tujuan yang jelas, dapat dicapai, dan terikat waktu. Tujuan akhir dari rancangan ini adalah membangun sistem pendidikan nonformal yang tangguh, di mana setiap organisasi dapat mendorong pengembangan karakter siswa yang kreatif dan cukup tangguh untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang terus berubah (Digitalisasi, 2026).

Bentuk Strategi Program Bantuan Sarana dan Peralatan

Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menerapkan pendekatan holistik yang memadukan pengembangan kapasitas kelembagaan dengan pendidikan fisik serta penyaluran barang semata. Karena bantuan sarana yang tidak selaras dengan kesiapan lembaga, seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), berpotensi meningkatkan inefisiensi dan penelantaran aset, maka metode menyeluruh ini dipilih. Akibatnya, teknik ini ditawarkan sebagai paket bantuan terpadu. Ini mencakup prosedur operasional standar (SOP) internal mengenai penggunaan fasilitas di berbagai lembaga sasaran, pengujian teknologi atau peralatan baru, serta proses pengembangan infrastruktur (Luarsekolah

et al., 2020). Dalam proses pendistribusian, strategi penyaluran bantuan ini menggunakan skala prioritas yang didasarkan pada data dari analisis kebutuhan sebelumnya. Dengan kata lain, pendistribusian sarana dan peralatan yang dibutuhkan tidak dilakukan secara serentak atau merata di seluruh wilayah; melainkan difokuskan pada satu bidang pendidikan yang dianggap memiliki kebutuhan terbesar, sekaligus memiliki komitmen organisasi yang baik (Pendidikan et al., 2013). Lembaga calon penerima diwajibkan untuk menyelesaikan proses verifikasi guna memenuhi kriteria kesiapan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh tim revitalisasi. Strategi kuota prioritas ini, yang didasarkan pada kompetensi kelembagaan, sangat efektif dalam memastikan bahwa anggaran pemerintah dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang benar-benar mampu memaksimalkan manfaat sarana yang bersangkutan. Mekanisme pendampingan dan pemantauan pasca penyaluran merupakan jenis strategi lain yang berfungsi sebagai instrumen keberhasilan program ini. Tim pengarah dari kementerian yang bersinergi dengan dinas pendidikan daerah setempat menerapkan strategi pengawasan partisipatif untuk mengevaluasi sejauh mana fasilitas baru tersebut, pada dasarnya, telah terintegrasi ke dalam kegiatan komunitas pembelajaran. Proses pendampingan berkelanjutan dirancang khusus untuk mengubah pola pikir pengelola lembaga dari sekadar penerima pasif menjadi pengelola fasilitas pendidikan yang mandiri dan berdaya guna. Melalui strategi pendampingan ini, diharapkan lembaga pendidikan nonformal tidak hanya mengandalkan bantuan sesaat, tetapi juga mengembangkan ketahanan operasional guna memitigasi risiko dan memperkuat sarana yang ada dalam jangka Panjang (PNFI, 2026).

D. Kesimpulan

Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menjalankan strategi program bantuan sarana dan peralatan dengan berlandaskan pada analisis kebutuhan yang mendalam terhadap lembaga pendidikan nonformal. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan program yang sistematis serta memiliki arah yang jelas sehingga bantuan yang diberikan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara efektif. Program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan nonformal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita ke-4, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Strategi penyaluran bantuan yang diterapkan bersifat holistik, tidak hanya menyediakan sarana fisik, tetapi juga memadukan pengembangan kapasitas kelembagaan serta pendampingan terintegrasi agar penggunaan bantuan menjadi berkelanjutan dan berdampak positif. Pendampingan dan pemantauan setelah penyaluran bantuan juga menjadi kunci keberhasilan program ini, dimana lembaga penerima didorong untuk menjadi pengelola mandiri yang mampu memelihara dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan optimal.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar Direktorat PNFI terus melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan secara berkala agar bantuan sarana dan prasarana selalu sesuai dengan kondisi terkini serta perkembangan lembaga pendidikan nonformal. Penguatan kapasitas manajemen dan literasi teknis para pengelola lembaga juga sangat penting agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah serta pihak terkait hendaknya memperkuat mekanisme monitoring yang partisipatif dan transparan dengan melibatkan komunitas pembelajaran guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, pendampingan berkelanjutan perlu dijadikan kebijakan utama agar lembaga pendidikan nonformal tidak hanya menjadi penerima bantuan sesaat, tetapi aktif mengelola dan mengembangkan fasilitas sesuai kebutuhan jangka panjang. Terakhir, integrasi dan adaptasi teknologi baru dalam pendidikan nonformal harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing peserta didik serta mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, program bantuan sarana dan peralatan Direktorat PNFI akan lebih efektif dan mampu mendukung pembangunan pendidikan nonformal yang berkualitas serta berkelanjutan.

E. Referensi

- Andriana, N. (2025). *Perencanaan sarana prasarana lembaga pendidikan di sdit putra pakuan bogor*. 1103–1122. <https://doi.org/10.30868/im.v8i02.8661>
- Digitalisasi. (2026). *PANDUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KONTEN DIGITALISASI PEMBELAJARAN*.
- Eko, R. wheelen. (2013). *Manajemen Strategis Model Hunger-Wheelen*. 4(C), 1–4.
- Ilmu, J., & Nonformal, P. (2022). *kualitas layanan pendidikan nonformal melalui berbagai*

- kebijakan. 08*(May), 1143–1154.
- Irmianti, R. A., Amanah, N., Masithoh, D., Yudha, R., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2026). *Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah 3T Indonesia : Analisis Fungsi Perencanaan Pendidikan Nasional Berbasis Digital. 4*, 4669–4679.
- Juknis, P. 55 T. 2025. (n.d.). *PerDirjen 55 Tahun 2025 Juknis Banpem Revitalisasi TA 2026.pdf*.
- Luarsekolah, J. P., Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). *PROSEDUR DAN TATA KERJA PENDIDIKAN NON FORMAL PROCEDURE AND WORKING PROCEDURE OF NON-FORMAL EDUCATION. 4*(2), 12–19.
- Muta, N. (2025). *Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bagi RT / RW dalam Meningkatkan Kualitas SDM di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Universitas Islam Jember , Indonesia Keywords : 72–86*.
- Organisasi, S. (2008). *STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(SMK/MAK)*.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2013). *Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia*.
- PNFI, K. (2026). *Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026*. kemendikdasmen direktorat PNFI.
<https://duniapenfi.kemendikdasmen.go.id/program-prioritas/revitalisasi>
- Wulandari, A., Wulandari, R., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Article, I., & Commons, C. (2023). *MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM PROSES. 2*(1), 36–45.